

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA BAPPEDA KABUPATEN LABUHANBATU

Sri Mulyanti Sitorus¹, Saiful Badli²

Universitas Teuku Umar

Email Adress : srimulyantisitorus11@gmail.com¹, saiful.badli@utu.ac.id²

Received : 13 Juli 2022

Revised : 20 Agustus 2022

Accepted : 01 September

© 2022 The Author : Published by. Cattleya Darmaya Fortuna

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dari pelaksanaan anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu untuk dapat mengetahui kinerja anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif melalui pendekatan kuantitatif untuk menghitung persentase efektivitas penggunaan anggaran belanja. Hasil analisis data diperoleh bahwa anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2016-2021 memiliki persentase yang fluktuasi. Penggunaan anggaran belanja pada Tahun 2016, 2018 dan 2020 memiliki tingkat efektivitas yang dikategorikan cukup efektif, sedangkan Tahun 2017 dan 2021 tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja dikategorikan efektif karena realisasi hampir mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pada Tahun 2019 terjadi penurunan tingkat efektivitas, dimana persentase tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 77,29% dan termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh, penggunaan anggaran belanja untuk merealisasikan pembangunan masih belum mencapai target anggaran belanja yang telah ditentukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Kata Kunci : APBD, Bappeda Efektivitas, Anggaran Belanja

Pendahuluan

Atas dasar dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pemerintahan Daerah saat ini memiliki otoritas yang lebih leluasa dalam mengelola wilayahnya, dan Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan atas proses, mekanisme dan menyusun tahapan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan dana otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh atas keberhasilan pembangunan daerah telah direalisasikannya.

Menurut (Safitri, 2016) otonomi daerah mempengaruhi kewenangan daerah yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Dalam konteks ini, daerah perlu secara bertahap untuk mengejar kemandirian dalam menghasilkan pendapatan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD negara, mempunyai fungsi, kedudukan dan peran esensial dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan masyarakat dengan baik (Azahra & Lubis, 2021).

Anggaran yang berasal dari pemerintah berkaitan dengan penetapan alokasi dana untuk setiap aktivitas dan program yang dijalankan menggunakan dana publik. Menurut (Sumenge, 2013) menyatakan bahwa anggaran publik adalah suatu perencanaan yang harus dicapai oleh pemerintah dan juga suatu pengendalian dalam mengalokasikan sumber dana yang disahkan oleh lembaga legislatif untuk dibelanjakan. Tuntutan dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat adalah tanggung jawab dalam melakukan optimalisasi sumber dana, yaitu mengalokasikan sumber dana secara efisien dan pemakaian sumber dana dengan meminimalisir penggunaan dan memaksimalkan hasil secara efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan

lembaga teknis dan juga tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang terfokus pada terbentuknya perencanaan pembangunan. Maka dari itu, sangat penting untuk melaksanakan analisis dalam penggunaan anggaran dan belanja dengan memperhatikan pedoman penyusunan laporan agar terlaksananya keefektifan realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah secara merata, Pemerintahan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu tentunya akan memakai dana anggaran APBD guna mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan. Jika anggaran APBD digunakan secara efektif dan efisien, maka perencanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan oleh masyarakat akan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah anggaran yang digunakan oleh pemerintahan daerah dikategorikan efektif dan efisien, maka diperlukan analisis realisasi anggaran belanja.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dari pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut (Pauwah et al., 2014) keuangan daerah diartikan sebagai kewajiban dan hak berupa nilai berbentuk uang dan barang yang dimiliki oleh daerah untuk digunakan dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan menurut (Halim, 2012) mengungkapkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah, lalu kemudian dikelola guna meningkatkan pembangunan daerah agar dapat mensejahterakan masyarakat. Keuangan daerah menjadi suatu unsur penting dalam merencanakan pembangunan daerah, agar dapat diketahui gambaran dari kondisi dan prediksi keuangan yang dibutuhkan dalam mendanai pembangunan daerah. Untuk dapat merealisasi pembangunan seperti tujuannya, maka pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah agar dapat menjalankan fungsi dari pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan regulasi.

Menurut peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, mendefinisikan keuangan daerah sebagai kewajiban dan hak yang dimiliki oleh daerah berupa uang atau barang yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Keuangan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperoleh dari hasil dana otonomi daerah yang sesuai dengan penetapan undang-undang. Yang dimaksud dengan daerah otonom adalah pemerintah yang mengelola provinsi, kabupaten dan pemerintahan kota. Pemerintah daerah merupakan sambung tangan atau bagian dari pemerintah pusat, yang keuangan daerah berasal dari penyaluran dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diberikan kepercayaan oleh pemerintahan pusat untuk mengelola keuangan yang diberikan guna memenuhi pelayanan, kebutuhan dan pembangunan wilayah otonom.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah pada keseluruhan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berupa perencanaan pelaksanaan, pengawasan keuangan daerah, penata usahaan, dan pelaporan keuangan (Halim, 2015). Dalam artian berarti pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang mengatur bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah serta pengalokasiannya. Mengingat pentingnya mengelola keuangan daerah melalui penggunaan anggaran APBD, maka pemerintah memperhatikan kinerja keuangan daerah yang direalisasikan minimal 5 tahun terakhir agar pemerintah mampu menganalisis laporan keuangan daerah.

Anggaran

Anggaran merupakan perencanaan aktivitas yang diwujudkan melalui bentuk keuangan (finansial), yang dapat berupa usulan pengeluaran yang diperhitungkan dalam periode waktu tertentu dan usulan tata cara memenuhi pengeluaran tersebut (Halim, 2015). Sedangkan menurut (Fauziah & Suraida, 2018) mengartikan Anggaran sebagai tata cara suatu aktivitas

yang dilakukan pemerintahan yang meliputi pendapatan, rencana, transfer, belanja dan pembiayaan yang diukur melalui finansial (rupiah) dan diurutkan serta disusun berdasarkan sistematis untuk satu periode.

Anggaran Sektor Publik

Menurut (Sujarweni, 2015) menyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan tanggungjawab dari manajemen organisasi untuk memberitahukan segala informasi mengenai kegiatan dan aktivitas rencana program yang dijalankan oleh organisasi kepada masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya. Pengertian ini sejalan dengan yang didefinisikan oleh (Fauziah & Suraida, 2018) yang mengartikan anggaran sektor publik adalah anggaran pemerintah yang berupa dokumen formal dari hasil kesepakatan antara lembaga legislatif dan eksekutif tentang penggunaan anggaran dalam menjalankan aktivitas pemerintah untuk memprediksikan besarnya pemakaian biaya untuk menghindari surplus atau defisit.

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam peraturan perundangan No.71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi dari aktivitas pemakaian keuangan pemerintah atau daerah yang mengindikasikan kepatuhan terhadap APBD/APBN. Laporan realisasi anggaran disajikan dalam rincian yang berkaitan dengan alokasi, sumber dan pemakaian sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah daerah/pusat dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran dapat menjadi suatu gambaran perbandingan antara anggaran yang berikan kepada pemerintah daerah dengan realisasi anggaran tersebut dalam periode satu tahun. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui efektivitas kinerja pemerintah daerah/pusat dalam merealisasikan anggaran yang telah disepakati guna mencapai rencana yang telah ditargetkan. Menurut (Bahri, 2021) mengungkapkan bahwa Laporan Anggaran Realisasi merupakan laporan yang memperlihatkan informasi dari hasil belanja, pendapatan dan pembiayaan anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang diberikan dalam satu periode untuk pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Menurut (Rampengan et al., 2016) belanja daerah merupakan keseluruhan pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi anggaran daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program pemerintah yang menjadi kepentingan pemerintah daerah seperti kegiatan pelayanan, pembangunan dan memperbaiki meningkatkan fungsi pemerintahan. Melalui belanja daerah ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi belanja yang mendukung kepentingan masyarakat dan menjaga eksistensi kegiatan pemerintahan.

Dalam pengelolaan belanja daerah kebijakan yang dilakukan bersifat bertahap berdasarkan kinerja dalam meningkatkan untuk mencapai hasil yang transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Ketentuan dari PP No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan pengeluaran daerah dapat berupa belanja modal, belanja operasi belanja transfer dan belanja yang tidak terduga. Belanja modal merupakan pengurangan anggaran belanja dari perolehan aset tetap dan aset lain yang dapat memberi keuntungan kepada pemerintahan daerah. Selain itu belanja operasi adalah pengurangan anggaran belanja daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan yang memberi keuntungan jangka pendek. Belanja operasi dapat berupa belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja pegawai, belanja bunga dan belanja sosial. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran kepada untuk membantu pemerintahan lainnya seperti pemerintahan desa. Sementara itu, belanja yang tidak terduga adalah pengurangan anggaran yang dikeluarkan karena adanya keperluan darurat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Efektivitas

Efektivitas yaitu suatu perbandingan antara hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang dapat direalisasikan (Mahmudi, 2015). Jika kontribusi hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan maka semakin baik kinerja, organisasi dan program yang dijalankan.

(Mahmudi, 2018) mengungkapkan bahwa suatu organisasi dalam dinilai efektif jika hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitu pula dengan sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, semakin efektif program yang dijalankan dan ketepatan penggunaan anggarannya (*spending wisely*) oleh pemerintahan daerah maka semakin baik realisasi pembangunan daerah yang ingin dicapai.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh (Sumenge, 2013) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran belanja BAPPEDA minahasa seleatan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Diperoleh hasil bahwa secara menyeluruh dari kriteria dan tingkat efektivitas keuangan BAPPEDA Minahasa selatan dalam periode kerja 2008-2012 berjalan secara signifikan. Pada anggaran Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 diketahui bahwa data efektif, namun pada tahun 2011 data mengalami penurunan dari target anggaran yang harus dicapai. Selain itu, diketahui bahwa anggaran Bappeda Minahasa Selatan pada periode 2008-2012 dinyatakan efisien dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2008-2011 pelaksanaan dikategorikan sangat efisien, sedangkan pada tahun 2012 pelaksanaan dianggap efisien.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh (Paat et al., 2019) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja Bappeda Kota Tomohon dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Bappeda Kota Tomohon 2015-2017 memiliki persentase efektivitas yang fluktuasi. Selama periode 2015 sampai 2017 pemakaian anggaran belanja memenuhi kategoricukup efektif, walaupun masih terdapat program atau aktivitas yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Tomohon. Hasil analisa efisiensi pemakaian anggaran Bappeda Kota Tomohon dianggap masuk kriteria efisien, hal ini dibuktikan dari pemerintahan dapat mengatur efisiensi anggaran belanja dan mampu meminimalisir inefisiensi dana dengan memaksimalkan pengelolaan anggaran.

Metode

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Labuhanbatu yang bertepatan di Jalan H. Idris Hasibuan Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan. Waktu dalam melaksanakan penelitian dilakukan mulai dari Tanggal 07 Februari 2020 – 20 Mai 2022.

Prosedur Penelitian

Penelitian dimulai dari melakukan perumusan masalah, melaksanakan studi pustaka, menentukan metode penelitian, pengumpulan data penelitian, pengolahan data melalui penyajian informasi yang diperoleh, lalu kemudian dilakukan analisis serta mengungkapkan gambaran yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulan akhir.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel bebas, baik satu variabel atau variabel ganda (*independent*). Selain itu, data digunakan diperoleh dari data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengukuran skala numerik atau angka. Menurut (Suharsaputra, 2014) metode kuantitatif merupakan metode yang dipakai untuk mendeskripsikan kejadian atau gambaran melalui perolehan data-data berupa angka lalu dianalisis menggunakan sistem statistik.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode

wawancara. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil catatan atau dokumen yang dipublikasi dan tidak dipublikasi oleh Bappeda Labuhan Batu. Menurut (Sugiyono, 2015) dokumen adalah catatan dari kegiatan atau aktivitas masa lalu baik itu dalam bentuk gambar, tulisan dan karya fenomenal seseorang.

Metode Analisis Data

Analisa data adalah suatu teknik dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, lalu kemudian ditafsirkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan data penelitian agar dapat ditarik kesimpulan akhir (Sugiyono, 2015).

Melalui metode ini dapat dilakukan perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Pengukuran tingkat efektivitas dalam bentuk persentase, dapat dihitung melalui perbandingan antara target anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja, melalui persamaan berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RAB}}{\text{TAB}} \times 100\%$$

Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 mengenai kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penggunaan anggaran belanja pemerintah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi jika memiliki persentase sebagai berikut (Depdagri, 1997) :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Anggaran Belanja Daerah

Persentase Pengukuran	Efektivitas
100% ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum BAPPEDA Labuhanbatu

BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan kegiatan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, menyusun dasar perencanaan daerah dan perencanaan anggaran keuangan pembangunan. Berdasarkan fungsi dan tugasnya, Bappeda memiliki peran otoritas dalam membuat surat rencana umum tata ruang (RUTR) dan juga pembuatan perizinan pembangunan perumahan dan kegiatan usaha, seperti surat izin pembangunan rumah, properti dan pembangunan lainnya (Bappeda Kabupaten Labuhanbatu). Dari tugas dan tanggungjawabnya, menunjukkan bahwa Bappeda memiliki peranan penting dalam menciptakan perencanaan dan mengkoordinasi pembangunan daerah sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Maka dari itu, agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, Bappeda perlu melihat ke efektivitasan penggunaan anggaran belanja pemerintahan daerah dalam menjalankan realisasi program pembangunannya.

Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2016	1.391.675.322.792	1.143.063.311.628	82,14	Cukup Efektif
2017	1.388.363.228.149	1.259.574.586.859	90,72	Efektif
2018	1.386.434.351.725	1.150.307.799.141	82,97	Cukup Efektif
2019	1.579.560.837.215	1.220.904.687.351	77,29	Kurang Efektif
2020	1.347.148.302.852	1.187.215.011.198	88,13	Cukup Efektif
2021	1.352.721.197.188	1.266.143.502.119	93,60	Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu (Data olahan)

Berdasarkan **Tabel 2** diatas data realisasi anggaran selama periode 2016-2021, tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami fluktuasi, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 82,14%, dan terjadi kenaikan pada tahun 2017 sebesar 8,58% menjadi 90,72%. Diketahui bahwa setelah mengalami peningkatan yang cukup tinggi di Tahun 2017, lalu kemudian di Tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 7,75% menjadi 82,97%. Tidak hanya itu, penurunan terulang kembali di tahun 2019 sebesar 5,68% dengan tingkat efektivitas 77,29% dan dikategorikan kurang efektif.

Kemudian tahun 2020 kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 10,84% dengan tingkat efektivitas menjadi 88,13%. Dan pada tahun 2021 terus mengalami kenaikan sebesar 5,47% dengan nilai efektivitas 93,60%. Secara keseluruhan dari realisasi anggaran pada periode tahun 2016-2021, tingkat efektivitas anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan dan penurunan. Jika persentase anggaran belanja meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan telah mampu mengelola anggaran belanja dengan baik. Sebaliknya jika terus menurun, maka dalam pengelolaan anggaran belanja tersebut tidak mampu mengelola dengan baik.

Pembahasan

1. Efektivitas Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Dalam mengelola anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu terdapat berbagai macam tingkat efektivitas yang beragam selama tahun 2016-2021. Pada tahun 2016 target anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebesar Rp 1.391.675.322.792 dan realisasi anggaran belanjanya sebesar Rp 1.143.063.311.628 dengan tingkat efektivitas sebesar 82,14%. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,58% dan tingkat efektivitasnya menjadi 90,72% dengan target anggaran belanja sebesar Rp 1.388.363.228.149 dan realisasi anggaran belanjanya Rp 1.259.574.586.859 sehingga realisasi tersebut masih dikategorikan efektif.

Namun pada efektivitas Tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 7,75% dari target anggaran belanja sebesar Rp 1.386.434.351.725 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 1.150.307.799.141 dengan persentase tingkat efektivitas 82,97% termasuk dalam kategori cukup efektif. Dan tahun 2019 kembali mengalami penurunan tingkat efektivitas sebesar 5,68% menjadi 77,29% termasuk kedalam kategori kurang efektif dengan target anggaran belanja sebesar Rp 1.579.560.837.215 dan realisasi anggaran belanja Rp 1.220.904.687.351. Kemudian pada tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 10,84% menjadi 88,13% termasuk kriteria cukup efektif dari target anggaran

belanja sebesar Rp 1.347.148.302.852 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 1.187.215.011.198.

Tahun 2021 tingkat efektivitas mengalami kenaikan sebesar 5,47% dan tingkat efektivitas menjadi 93,60% dari target anggaran belanja Rp 1.352.721.197.188 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 1.266.143.502.119 tingkat efektivitas tahun 2021 termasuk kriteria yang efektif. Tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja kurang efektif disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja untuk merealisasikan pembangunan masih jauh dari target anggaran yang ditentukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu penggunaan anggaran belanja yang dikategorikan efektif dikarena anggaran sudah memenuhi atau mendekati realisasi yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

Dalam pengelolaan anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu memiliki berbagai macam tingkat efektivitas yang beragam selama tahun 2016-2021. Penggunaan anggaran belanja pada Tahun 2016, 2018 dan 2020 memiliki tingkat efektivitas yang masih dikategorikan cukup efektif, sedangkan Tahun 2017 dan 2021 tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja dikategorikan efektif karena realisasi hampir mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, pada Tahun 2019 terjadi penurunan tingkat efektivitas, dimana persentase tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 77,29% dan termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh, penggunaan anggaran belanja untuk merealisasikan pembangunan masih jauh dari target anggaran belanja yang telah ditentukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Kesenjangan ini dikarenakan Bappeda Kabupaten Labuhan tidak menjalankan program kegiatan padahal sudah dianggarkan, namun rencana tersebut belum dapat dilaksanakan pada Tahun tersebut.

Secara keseluruhan dari realisasi anggaran pada periode tahun 2016-2021, tingkat efektivitas anggaran belanja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan dan penurunan. Jika persentase anggaran belanja meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan telah mampu mengelola anggaran belanja dengan baik. Sebaliknya jika terus menurun, maka dalam pengelolaan anggaran belanja tersebut tidak mampu mengelola dengan baik.

Saran

Untuk instansi tempat dilaksanakannya penelitian yaitu Kantor Bappeda Labuhanbatu agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola anggaran belanja ditahun yang akan datang, melalui merealisasi keseluruhan program perencanaan yang telah dianggarkan agar memenuhi target anggaran yang ditargetkan dalam suatu kegiatan. Diharapkan juga kepada kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu lebih meningkatkan lagi tingkat efisien penggunaan anggaran ditahun kedepannya agar mampu mencapai kriteria yang sangat efisien, dan nantinya mengenai pelaksanaan perencanaan anggaran belanja daerah ditahun mendatang tidak bermasalah.

Daftar Pustaka

- [1] Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8234–8245.

<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>

- [2] Bahri, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Bandung*. CV. Media Sains Indonesia.
- [3] Depdagri. (1997). *Kepmendagri Nomor 690.900.327, 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- [4] Fauziah, & Suraida. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas-Dinas Di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)*. UNPAS Bandung.
- [5] Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- [6] Halim, A. (2015). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- [7] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- [8] Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. UII Press.
- [9] Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- [10] Pauwah, S., Saerang, I., & Mandey, S. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMDA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1–12.
- [11] Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616–623.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>
- [12] Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pendidik dan Sejarah*, 5(9), 79–83. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- [13] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- [14] Suharsaputra, U. (2014). *etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. PT Refika Aditama.
- [15] Sujarweni, V. M. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Press.
- [16] Sumenge, A. S. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA*, 1(September), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>